

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Tuntutan rakyat agar Polri bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, serta pelaksanaan fungsi dan peran sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terwujud saat Presiden RI pada upacara HUT Bhayangkara ke 54 tanggal 1 Juli 2000 meresmikan reorganisasi Polri keluar dari Departemen Pertahanan dan TNI. Sejak saat itulah Polri memegang kekuasaan penuh urusan keamanan dalam negeri. Polri sebagai lembaga yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan dan membiayai dirinya sendiri. Menjadi suatu lembaga yang memiliki kemandirian adalah satu langkah awal menuju profesionalisme kerja Polri (Rahardi, dalam Agustina 2010).

Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial sebaiknya tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya ekonomi, dan politik masyarakat. Polisi harus mampu menjadi mitra masyarakat dengan berusaha memahami atau cocok dengan masyarakat, serta menjadi figur

yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum (dalam Wulandari, 2014).

Pelaksanaan tugas dalam Polri secara umum terbagi dalam lima fungsi kepolisian, yaitu fungsi intelijen, fungsi reserse, fungsi samapta, fungsi lalu lintas dan fungsi bimbingan masyarakat (Sutanto, dalam Agustina, T Eva 2010). Polisi fungsi samapta merupakan fungsi teknis kepolisian yang mengemban tugas preventif dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi tugas samapta polri adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pertolongan dan penyelamatan, pelayanan unjuk rasa/ Dalmas (Pengendalian Massa) dan tugas polisi umum. Samapta identik dengan patroli, hadir di tengah masyarakat terutama di pusat kegiatan, pemukiman, dan daerah-daerah yang menuntut kehadiran polisi. Polisi fungsi samapta bekerja ditempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang terbuka, sehingga masyarakat secara bebas dapat memberikan penilaian atas perilaku polisi-polisi tersebut. Di tempat-tempat itulah pelaksanaan pekerjaan polisi yang ideal dan profesionalisme polisi teruji. Keberhasilan atau kegagalan polisi akan ditentukan dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara profesional (Mulyono, dalam Agustina, T Eva 2010).

Pelayanan kepada masyarakat dalam institusi Polri banyak dilaksanakan oleh fungsi samapta. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengamanan unjuk rasa atau pengendalian massa adalah salah satu implementasi tugas samapta polri. Pengendalian massa adalah suatu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang

menyampaikan pendapat atau penyampaian aspirasinya di depan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator. Upaya untuk mengendalikan massa sering kali berujung pada tindak kekerasan (Sutanto, dalam Agustina 2010).

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selaknyaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi (dalam Putra, 2017).

Dalam pelaksanaannya demonstrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa. Seperti kasus trisakti demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Suharto yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas menjaga demonstrasi

yang memaksa aparat polisi untuk melepaskan tembakan dan menyebabkan tujuh mahasiswa tewas ([www.wikapelda.org.id](http://www.wikapelda.org.id) dalam Asmoro dkk, 2018).

Kekerasan juga dilakukan oleh aparat terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang diberitakan MetroTV, warga menuntut keadilan atas pembagian hasil tambang. Mereka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tambang yang terbesar di Indonesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukul dan menyemprotkan *wathercann* (semprotan air) kearah para demonstran (MetroTV, dalam Asmoro dkk, 2018).

Peristiwa anarkis Makassar pada 4 dan 5 Maret 2010 menunjukkan bahwa aparat dalam hal ini pengendalian massa bertindak cenderung represif. Hal ini dipicu oleh tindakan sejumlah polisi dan warga yang melakukan kerusakan terhadap sekretariat HMI cabang Makassar pada hari Kamis (4/3/2010). Bahkan selanjutnya kerusuhan itu meluas menjadi pertarungan horizontal antara warga dan mahasiswa (Judarwanto, dalam Asmoro dkk, 2018) . Kasus serupa juga terjadi pada Tragedi UNAS (Universitas Nasional) Jakarta pada 24 Mei 2008 yang menuntut turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) juga berakhir dengan kerusuhan. Pada peristiwa itu aparat melakukan penyerbuan hingga ke dalam lingkungan kampus UNAS dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kampus.

Mengapa polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi? Salah satu penjelasannya adalah adanya perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang

mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara (dalam Sarwono, dalam Sapari dan Kurniati 2008).

Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya pembenturan kepentingan. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antarkeduanya. Dimata masyarakat, kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Ditinjau dari teori Myers (dalam Sarwono, dalam Sapari dan Kurniati 2008), ketika seseorang merasa tidak dapat dikenali akan lebih besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku antisosial.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga bisa terjadi karena membela teman atau kelompoknya. Menurut Puspito (dalam Sapari dan Kurniati 2008), para anggota kelompok cenderung merasa sebagai “orang kita” karena mereka

mempunyai tujuan yang sama dan menaati kaidah yang sama (*ingroup*), sedangkan orang lain yang bukan dari kelompoknya tidak dapat dipercaya, dan oleh karenanya “orang luar” itu tidak dapat dijadikan basis hubungan yang akrab, atau secara ekstrim harus berhati-hati (*outgroup*). Sebagai contoh kerusuhan yang terjadi di Papua seperti dikutip Kompas (18/03/06), Aparat yang berjaga-jaga untuk mengamankan demonstrasi diserang oleh para demonstran dan tiga dari teman mereka terluka, lalu aparat membalas dengan memukul bahkan menembakkan senjata kearah para demonstran, yang menyebabkan korban luka-luka.

Kekerasan yang dilakukan oknum polisi juga menjadi berita dalam Liputan6.com pada 2 September 2015. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama puluhan aktivis buruh lintas serikat pekerja, mengklaim menjadi korban dugaan penganiayaan oknum polisi. Kejadian itu berlangsung saat mereka menggelar aksi damai di depan Istana Negara (Jumat, 30 Oktober 2015). "Saat itu saya berada di dekat pospol (pos polisi) melihat polisi memukul buruh. Saya mencoba mendokumentasikan namun para polisi menyuruh saya menghapus. Saya lari, dan polisi mengejar. Akhirnya saya pun disekap polisi. Padahal saya sudah bilang dari LBH tapi tetap ditangkap," ujar Obed di kantor LBH Jakarta (2/11/2015). "Saya diseret, ditendang kepala saya, tangan saya. Kacamata saya jatuh dan pecah, sepatu saya terlepas. Terus ada yang bilang 'habis lu ama gue entar'," cerita Obed. Pemberitaan kasus mengenai penyalahgunaan senjata api (Okezone.com, 17 Juni 2015) juga marak terjadi beberapa akhir ini, penembakan oknum polisi pada warga serta berita lainnya. Sopir Angkot D.01 CiputatKebayoran bersama rekannya diringkus polisi, setelah membawa senjata api (senpi) jenis pistol. Setelah ditelusuri,

pistol tersebut didapat dari oknum polisi yang bertugas di Polsek Ciputat (dalam Anggraini, D Fetty, 2019).

Kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 di atas. Misalnya tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan HAM masyarakat lalu melupakan hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau petugas, dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tetapi karena masih ada tindak kekerasan main hakim sendiri yang melanggar HAM maka tindakan tersebut tidak kita tolerir/salah (Julia, dalam Anggraini, D Fetty, 2019).

Apapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu bisa digolongkan agresivitas. Berkowitz (dalam Sapari dan Kurniati 2008) memberikan definisi tentang agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Buss dan Perry (dalam Sentana&Kumala, 2017) agresivitas adalah keinginan untuk menyakiti individu lain, dengan cara mengekspresikan perasaan negatifnya seperti permusuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen agresivitas terdiri dari agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan (Buss dan Perry, dalam Sentana & Kumala, 2017).

Dalam psikologi sosial, agresivitas umum didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang tidak menginginkan terjadinya peristiwa tersebut (Allen & Anderson, dalam Asmoro, dkk 2018). Berkowitz (dalam Asmoro, dkk 2018) membedakan agresivitas dalam dua macam yaitu agresi

instrumental, yaitu agresi yang dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, agresi kebencian (*hostile aggression*) merupakan agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk menyakiti korban. Allen dan Anderson (dalam Asmoro, dkk 2018) juga menjelaskan bahwa agresi merupakan fenomena yang terjadi dalam berbagai bentuk tindakan mulai dari tindakan yang relatif kecil seperti mengejek nama atau ke tindakan yang lebih serius seperti memukul, menendang, atau meninju dan untuk tindakan yang berat seperti menikam, menembak, atau membunuh. Allen dan Anderson (dalam Asmoro, dkk 2018) menunjukkan tiga karakteristik bagaimana suatu fenomena dikatakan sebagai agresivitas yaitu: 1) sikap bermusuhan, keyakinan, pikiran, atau keinginan dan pengaruhnya misalnya, perasaan marah, kemarahan, dan keinginan untuk membalas dendam; 2) tindakan agresi itu harus disengaja dan dilakukan dengan tujuan merusak yang lain; 3) agresi menargetkan orang lain dan merusak benda mati misalnya menendang, menghancurkan atau menumbuk. Berdasarkan batasan ini, dapat disimpulkan bahwa agresivitas merupakan bentuk tingkah laku, yang bertujuan untuk menyerang orang atau pihak lain, atau obyek di lingkungannya, baik secara verbal maupun fisik, atau psikologis, pada subyek yang dikenainya. Tingkah laku ini nyata dan ada unsur kesengajaan.

Agresivitas adalah suatu usaha untuk melukai atau menghancurkan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya agresivitas merupakan segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya (Faturochman, dalam Supriyanto, 2017).



Rahayu (dalam Sabintoe, dkk 2020) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa agresivitas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang ada dalam diri seseorang yang berupa kematangan emosi yang kurang baik. Seseorang yang telah matang emosinya berarti dia mampu dalam mengendalikan luapan emosi dan nafsunya, sehingga seseorang tersebut dapat mengelolanya dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang berada di lingkungan sekitar yang berupa stimulus yang kurang baik yang diterima dari lingkungannya.

Menurut Rahayu (dalam Sabintoe, dkk 2020), setiap individu memiliki respon emosi yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kematangan emosinya. Emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan faktor eksternal seperti frustrasi dan provokasi, menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresif yang akan mempengaruhi perilaku individu. Individu dengan tingkat kematangan emosional tinggi mampu meredam dorongan agresif dan mengendalikan emosinya, pandai membaca perasaan orang lain, serta dapat memelihara hubungan baik dengan lingkungannya. Sehingga apabila individu memiliki kematangan emosi yang baik maka individu tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku agresifnya

Salah satu faktor penyebab agresi adalah kondisi rentannya kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional, dan arena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menunjukkan pola emosi yang pantas ditampilkan saat di masyarakat (Sarwono, dalam Sapari & Kurniati 2008). Davidoff (dalam Asih dan Pratiwi, 2010) menerangkan bahwa kematangan emosi merupakan kemampuan individu untuk

dapat menggunakan emosinya dengan baik serta dapat menyalurkan emosinya pada hal-hal yang bermanfaat dan bukan menghilangkan emosi yang ada dalam dirinya. Pastey & Aminbhavi (dalam Sapari & Kurniati 2008) menggambarkan orang yang memiliki kematangan emosi adalah orang yang dapat mengontrol kehidupan emosinya dengan baik. Kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional dan pribadi yang bersangkutan terdapat keterlibatan kontrol emosional (dalam Sapari & Kurniati 2008).

Kematangan emosi dapat mempengaruhi agresi. Apabila individu lebih memiliki emosi negatif yang menghasilkan perasaan negatif, agresinya bisa meningkat. Sebaliknya, apabila individu lebih banyak memiliki emosi positif yang menghasilkan perasaan positif, maka akan menurun agresinya (Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian, 2012). Hal senada juga disampaikan Zilman (dalam Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian, 2012) menggabungkan tipe emosi dengan *arousal effect* model. Model ini mengarahkan pada pengaruh pengalaman emosi pada seseorang yang telah marah dan kemudian memiliki kesempatan untuk membalas. Zillman (dalam Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian, 2012) menyatakan bahwa stimulus yang menghasilkan emosi negatif dan *arousal* yang tinggi meningkatkan agresi. Bahkan meski stimulusnya netral jika arousalnya tinggi dapat meningkatkan agresif Hurlock (dalam Sapari & Kurniati 2008) menyatakan bahwa individu yang matang secara emosi akan memiliki kontrol diri yang baik, mampu menunjukkan ekspresi emosinya dengan tepat dan sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, sehingga individu tersebut mampu beradaptasi dengan baik dan memberikan reaksi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang sedang dialami.

Kemampuan individu untuk merespon stimulus yang berpengaruh terhadap lingkungannya dapat ditunjukkan dengan pribadi yang sehat, terarah dan jelas sesuai dengan stimulus serta tanggung jawab atas segala keputusan dan perbuatannya terhadap lingkungan. Jika hal tersebut terpenuhi, maka individu tersebut dikatakan matang emosinya (Cole dalam Khotimah, dalam Guswani & Kawuryan 2011). Menurut Bimo Walgito (dalam Fitri & Adelya, 2017) “kematangan emosi adalah individu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti, anak-anak atau orang yang tidak matang ”Menurut Hurlock (dalam Guswani & Kawuryan 2011) kematangan emosi adalah apabila individu menilai situasi secara kritis terlebih dulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berfikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang belum matang. Kematangan emosi adalah kemampuan menerima hal-hal negatif dari lingkungan tanpa membalasnya dengan sikap yang negatif, melainkan dengan kebijakan (Martin, dalam Guswani & Kawuryan 2011). Kematangan emosi adalah kepribadian individu yang mampu untuk mengontrol atau mengendalikan emosinya dengan baik, termasuk cara pengungkapan dan mengatasi emosi tersebut (Hurlock, dalam Sabintoe, dkk 2020). Singh dan Bhargava (dalam Yansyah, 2020) menjelaskan kematangan emosi yaitu tidak hanya berperan sebagai penentu efektif pada pola kepribadian tetapi juga membantu untuk mengontrol pertumbuhan perkembangan remaja, individu yang dapat mengontrol emosi dan mampu menjaga emosinya, mampu menghindari keterlambatan pertumbuhan dan mampu bertahan pada penderitaan sehingga tidak mengasihani diri sendiri dapat dikatakan individu yang memiliki emosional yang baik.

Katkovsky dan Gorlow (dalam Sabintoe, dkk 2020), mengatakan ciri-ciri orang yang telah matang emosinya memiliki kemandirian, kemampuan menerima kenyataan, kemampuan beradaptasi, kemampuan merespon dengan cepat, merasa aman, kemampuan berempati dan kemampuan menahan amarah. Gunarsa (dalam Olga, 2019) menjelaskan bahwa kematangan emosi adalah dasar dari perkembangan individu yang dapat mempengaruhi tingkah laku, kematangan emosi akan semakin meningkat secara bertahap sesuai tahap perkembangannya. Pendapat tersebut sejalan dengan Budiarjo (dalam Olga, 2019) yang menyatakan bahwa kematangan emosi adalah tanggapan emosional yang matang berdasarkan usia individu dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kematangan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi yang ada dalam dirinya untuk bersikap lebih baik sesuai kualitas yang diinginkan. Anggota Sabhara yang memiliki kematangan emosi yang baik akan mampu mengendalikan perilaku saat menangani huru hara di lapangan guna mencapai kualitas dalam pencapaian tugas sebagai pengayom masyarakat. Salah satu faktor penyebab agresi adalah kondisi rentannya kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional, dan arena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menunjukkan pola emosi yang pantas ditampilkan saat di masyarakat (Sarwono, uswani & Kawuryan, dalam Asmoro dkk 2018).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 orang anggota ditsabhara, 3 orang yang mengaku jika mereka mampu mengendalikan emosi pada saat demonstrasi berlangsung, bahkan mereka memberikan minuman kepada massa

yang sedang melakukan demonstrasi, mereka tidak pernah mengatakan ucapan keras, sedangkan 7 lainnya menjawab berbeda, mereka menjawab, jika saat berlangsungnya demonstrasi, mereka merasa marah dan tidak terima ketika para demonstran sudah melemparkan benda tajam atau tumpul ke arah mereka, bahkan ketika semuanya anarkis, mereka juga ikut memukul massa agar menjauh dari lokasi dan bubar dari tempat demon, mereka juga mengumpat berkata kotor, karena dengan mengeluarkan kata kotor mereka merasa lega dan emosi mereka tersalurkan, 3 dari 7 anggota sabhara juga berpikir jika massa yang melakukan demo pasti tidak akan berujung damai, ujung-ujungnya berakhir rusuh. Mereka tidak dapat menerima hal yang buruk dari para demonstran mereka akan membalas apa yang mereka dapatkan dengan setimpal karena emosi yang meluap yang tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut sejalan dengan teori Buss & Perry (dalam Wulansari 2018) mengenai dimensi dari agresivitas itu sendiri dimana terdapat dimensi *Physical Agression* yaitu agresi yang dilakukan untuk melukai dan menyakiti seseorang secara fisik, *Verbal Agression* dimana agresivitas dalam bentuk ucapan yang menyakiti atau melukai orang lain, *Anger Agression* yaitu perasaan tidak senang akibat reaksi fisik yang dialami oleh tersebut dan *Hostility Agression* dimana sikap dan perasaan negatif terhadap orang lain yang muncul karena penilaian negatif dari diri sendiri dari hasil kognitif.

Fenomena di atas juga sejalan dengan teori Kematangan emosi dari Walgito (dalam Guswani & Kawuryan 2011) dimana aspek-aspek kematangan emosi tersebut dijelaskan a. Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain seperti apa adanya, dalam fenomena diatas beberapa dari subjek yang diwawancara tidak menerimana keadaan yang semestinya sedang dialami b. Tidak impulsif, subjek

wawancara tidak sesuai dengan aspek ini karena mereka impulsif dan melakukan hal yang dapat menahan emosi c. Dapat mengontrol emosi dan ekspresi emosinya dengan baik, subjek tidak mampu mengontrol emosi ketika berhadapan dengan demonstran yang anarkis d. Dapat berfikir secara objektif dan realistis, sehingga bersifat sabar, penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik, sedangkan subjek yang diwawancara tidak sabar dan membalas apa yang mereka diterima e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian, subjek tidak menghadapi dengan penuh perhatian, melainkan membalas perlakuan para demonstran. (dalam Guswani & Kawuryan 2011).

Penelitian tentang kecerdasan emosi dan perilaku agresif telah dilakukan oleh Mukarromah (Guswani & Kawuryan, dalam Asmoro dkk 2018) terhadap anggota polisi samapta di Jakarta dan menemukan bahwa ada hubungan yang negatif antara kecerdasan emosi dan perilaku agresif mereka. Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosi mereka maka semakin rendah agresivitasnya. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosinya, semakin tinggi pula agresivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosi positif pada para anggota kepolisian penting dimiliki agar mereka dapat menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban tanpa menggunakan tindakan agresif. Kematangan emosi dapat mempengaruhi agresi. Apabila individu lebih memiliki emosi negatif yang menghasilkan perasaan negatif, agresinya bisa meningkat. Sebaliknya, apabila individu lebih banyak memiliki emosi positif yang menghasilkan perasaan positif, maka akan menurun agresinya (Suryanto, Putra, Herdiana, & Alfian, uswani & Kawuryan, dalam Asmoro dkk 2018). Penelitian sebelumnya tentang agresi pada anggota polisi dan

satuan pengamanan lainnya telah dilakukan. Sabriadi (dalam Asmoro, dkk 2018) mengkaji hubungan kontrol diri pada 79 anggota Polisi di empat sektor di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan ada hubungan yang signifikan yang negatif antara kontrol diri dengan perilaku agresi. Semakin tinggi kontrol diri terkait dengan semakin rendahnya perilaku agresi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ini yaitu terdapat pada subjek dan tempat penelitian yang akan dilakukan mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas anggota ditsabhara Polda Sumbang dalam menangani demonstrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sebagian aparat melakukan tindakan agresif pada saat demonstrasi maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku agresif anggota Sabhara dalam menangani demonstrasi.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan kajian, informasi dan ilmu Psikologi, khususnya di bidang Psikologi Sosial yang berhubungan dengan kematangan emosi dengan agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Ditsabhara Polda Sumbar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada ditsabhara polda sumbar mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memahami kematangan emosi dan perilaku agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.

- c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya untuk mengembangkan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan bahan perbandingan dalam melakukan kajian penelitian selanjutnya serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan abru mengenai kematangan



emosi dengan agresivitas pada anggota ditsabhara polda sumbar dalam menangani demonstrasi.